

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. P. (2010). *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmojo, B. T. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Batang Tahun 1998-2002*.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications. London
- Fattah, M. Y. (2007). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Mamuju Tahun 1995-2004*.
- Fisher, R.C (1996). *State and Local Public Finance*, Irwin, New York.
- Ghozali, I. (2006). *Analisis Multi Variate dengan Program SPSS Edisi ke 3*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (1995). *Dasar - Dasar Ekonometrika alih bahasa Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing :Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Harits, B. (1995). *Peran administrator Pemerintah Daerah, Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah* Prisma
- Herlina, A. (2008). *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Julianti, S. R. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang*.
- Kaho, J. R. (1997). *Prospek otonomi Daerah dan Negara RI*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir dan Jakfar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis* . Prenada Media, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Mahmudi, (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____. (2009) *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta.

Makhfatih, Mardiasmo. &. (2000). *Perhitungan potensi Pajak dan Retribusi di Kabupaten Magelang.*

Mangkusubroto, G. (1991). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Musgrave, R. A. (1990). *Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek (edisi 5)*. Jakarta: PT. Erlangga.

Nachrowi , Hardius Usman. (2006). *pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.

Permana, A. I. (2013). *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2012 *Tentang retribusi Jasa Umum* (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012)

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2012 *Tentang retribusi Jasa Umum* (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012)

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 9 tahun 2012 *Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota*

Prakoso, B. K. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Santosa, B. (1995). *Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Prisma.

Saputri, F. D. (2014). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Anduonohu di Kota Kendari*.

Saragih, J. P. (2003). *Peningkatan penerimaan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan* . Majalah Perencanaan Pembangunan .

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono.(2007) *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif ,kualitatif, dan R&D*.Bandung: ALFABETA

Sugiyono, (2011).*Metode Penelitian Pendidikan (PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*; Alfabet. Bandung.

Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka.

Suparmoko. (1997). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: 1997

Sutendi (2009) *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika

Revolina & Yuliani. (2013). *Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lebong (Studi Terhadap Jumlah Pedagang dan Pertumbuhan Ekonomi.*

Rosen,H.S (1988). *Public Finance.Second Edition.Washington*

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika (Pengantar dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Winardi. (1988). *Kamus Marketing*. Bandung: Transito.

Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

